

## ABSTRAK

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang mana sebagian besar dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Selama ini kebutuhan akan dana dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Seiring dengan tuntutan jaman gadai dianggap kurang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama masyarakat kecil terkait dengan objek yang harus diserahkan kepada pihak yang menerima fidusia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka perusahaan pembiayaan pun tidak ketinggalan untuk menambah bidang usaha antara lain pemberian kredit angsuran dengan sistem Fidusia, karena dengan sistem Fidusia ini dianggap bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat khususnya pengusaha kecil dalam memperoleh kredit dengan jaminan fidusia sehingga kredit diperoleh dan barang jaminan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan. Sejalan dengan program pemerintah untuk menggiatkan pemberian kredit kepada masyarakat dan golongan ekonomi lemah yang mana merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan kredit berdasarkan sistem Fidusia dapat membantu baik bagi penerima kredit maupun pemberi kredit. Salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bila hak jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.

Metode penelitian menggunakan metode Normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan jaminan fidusia. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang mana pelaksanaan eksekusinya dibuat secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Namun dalam praktek sering kita ketahui bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan fidusia kendaraan bermotor roda dua sering dilakukan secara paksa, yang mana menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menegaskan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan secara paksa, eksekusi hanya boleh dilakukan atas dasar kesukarelaan pemberi fidusia untuk menyerahkan barang jaminan fidusia. pelaksanaan eksekusi secara paksa hanya dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

*Kata kunci : Eksekusi Secara Paksa, Jaminan Fidusia.*

## ABSTRACT

With the increase in development activities, there has also been an increase in the need for funding, where most of the funds to meet these needs have been obtained from lending and borrowing activities. So far, the need for funds is met by various financial institutions, one of which is a financing company. Along with the demands of the pawnshop, it is considered that it is less able to accommodate the needs of the community, especially small communities, in relation to objects that must be submitted to those who receive fiduciary. So that to meet the needs of the community, the finance company is not left behind to add business fields, among others, the provision of installment loans with the Fiduciary system, because with this Fiduciary system, it is considered able to overcome the difficulties of the community, especially small entrepreneurs in obtaining credit with fiduciary collateral so that credit is obtained and collateral is still in his hand while his business is still running. In line with the government's program to encourage the provision of credit to the people and weak economic groups which constitute the largest part of the Indonesian people. So it is expected that credit based on the Fiduciary system can help both credit recipients and credit providers. One of the parameters of a good material debt guarantee is that the collateral rights can be executed quickly with a process that is simple, efficient and contains legal certainty.

The research method uses the Normative method, which is an approach taken to analyze the extent to which a regulation / law or law that is effectively applied in this case the approach is used to analyze qualitatively about the implementation of fiduciary guarantees. The data used are primary data that is data obtained directly from the field, namely interviews and secondary data in the form of literature studies. The analysis used is a qualitative analysis that deductively draws conclusions. Arrangements regarding the execution of Fiduciary Guarantees in Indonesia have been regulated in the Fiduciary Security Act Number 42 of 1999 where the execution is varied, so parties can choose which execution model they want. But in practice we often know that the implementation of fiduciary guarantees carried out by fiduciary finance companies two-wheeled motor vehicles are often carried out by force, which according to law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees confirms that executions should not be carried out by force, executions are only may be done on the basis of volunteerism of fiduciary providers to surrender fiduciary collateral. Forced executions can only be carried out by the Police Based on Perkap Number 8 of 2011 concerning securing fiduciary guarantees.

*Keywords: Forced Execution, Fiduciary Guarantee*